



Photo: Unsplash

Kepala LPEM FEB UI

Riatu Mariatul Qibthiyah, S.E., MA., Ph.D.

Pimpinan Redaksi

Dr. Alin Halimatussadiah

Redaktur Pelaksana

Assyifa Szami Ilman, S.E.

Giani Raras, S.E.

Calista Endrina Dewi, S.E.

Editor

Firli Wulansari Wahyuputri, S.E.

Nismara Paramayoga



Scan untuk
mengetahui
informasi
tentang LPEM
lebih lanjut

Selamat datang di LPEM Newsletter Edisi Oktober 2021. LPEM Newsletter merupakan buah pemikiran dan rangkuman kegiatan tim LPEM FEB UI. Edisi ini merupakan keluaran kedelapan dan senantiasa akan diterbitkan setiap bulannya. Sejak 1953, LPEM FEB UI secara aktif telah melakukan kegiatan penelitian, konsultasi, dan pelatihan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembangunan di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan banyak berfokus ke berbagai isu terkait kelembagaan, ekonomi regional, perdagangan internasional, keuangan dan perbankan, ekonomi fiskal dan moneter, pertanian, industri, pariwisata, pembangunan pedesaan, lingkungan, demografi, ketenagakerjaan, kemiskinan, dan UMKM.

Pada edisi kali ini, LPEM Newsletter akan merangkum infografis yang dirilis pada bulan September lalu, yaitu "**Membiayai Infrastruktur Tahan Bencana di Indonesia**". Selain itu, edisi kali ini juga akan membahas dua artikel opini yang telah dimuat di harian Kontan dengan tema "**Presidensi Indonesia dalam Forum G20 2022**". Edisi ini juga memuat rangkuman atas sesi pemaparan yang disampaikan peneliti kami dalam **Forum Kajian Pembangunan**. Terakhir, edisi ini akan mengulas **Policy Brief** terbaru yang dirilis oleh Tim Kajian Bisnis Iklim dan Global Value Chain LPEM FEB UI.

Selamat membaca,

Alin Halimatussadiah

Ketua Kelompok Kajian Ekonomi Lingkungan
LPEM FEB UI



FEUI.LPEM



lpemfebui



LPEMFEBUI



LPEM FEB UI



marcom@lpem-feui.org

Mencari Alternatif Pembiayaan bagi Infrastruktur Tahan Bencana di Indonesia



Indonesia dihadapkan oleh berbagai ancaman, mulai dari perubahan iklim hingga kondisi geologis yang membuat Indonesia semakin rentan terhadap bencana alam. Kendati pembangunan infrastruktur tahan bencana menjadi sangat diperlukan, sumber pembiayaan infrastruktur tahan bencana di Indonesia masih relatif terbatas hingga saat ini. Dengan adanya kebutuhan untuk meningkatkan aspek ketahanan infrastruktur, Indonesia membutuhkan potensi pembiayaan yang lebih luas.

LPEM FEB UI pada (09/24) telah merilis infografis mengenai "**Membiayai Infrastruktur Tahan Bencana di Indonesia**". Teuku Riefky, Peneliti LPEM FEB UI, menyampaikan bahwa kebutuhan akan alternatif pembiayaan untuk infrastruktur tahan bencana di Indonesia muncul dari beberapa faktor. "Pertama, dengan semakin besarnya risiko perubahan iklim dan posisi geologis Indonesia yang rawan bencana membuat kebutuhan infrastruktur yang tahan bencana menjadi sangat mendesak. Kedua, Indonesia memiliki ruang fiskal yang terbatas sehingga anggaran pemerintah tidak mencukupi untuk mendanai keseluruhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahan bencana." ujar Riefky.

Menurut Riefky, beberapa instrumen yang telah tersedia sebelumnya masih memiliki potensi untuk dioptimumkan agar dapat berkontribusi lebih terhadap pembiayaan infrastruktur tahan bencana. "Beberapa instrumen tersebut mencakup Sovereign Wealth Fund dan Viability Gap Fund, dan Green Bonds." terang Riefky. Di samping itu Riefky juga menambahkan terdapat beberapa instrumen yang sudah tersedia namun belum secara spesifik mendanai infrastruktur tahan bencana dapat menjadi alternatif, seperti dana pensiun dan Venture Capital.

Selengkapnya:
<https://bit.ly/Infografis210924>

Merangkul Disabilitas dalam Agenda Ketenagakerjaan Negara-Negara G20

Pertemuan perwakilan berbagai negara dalam forum multilateral merupakan fenomena yang lumrah ditemui setiap tahun. Pertemuan tersebut dapat berupa diskusi kebijakan seperti KTT PBB hingga kompetisi olahraga seperti Olimpiade Tokyo 2020. Pada 2022 mendatang, Indonesia resmi menjadi tuan rumah serangkaian kegiatan pertemuan G20. Pertemuan multilateral ini diharapkan akan berdampak terhadap tenaga kerja, peningkatan konsumsi domestik hingga akhirnya meningkatkan PDB Indonesia, tulis Muhammad Hanri, S.E., M.Sc., Ph.D., Kepala Kajian Sosial dan Ketenagakerjaan LPEM FEB UI di Harian Kontan 30 September lalu.

Dalam jangka pendek, penyelenggaraan forum internasional di Indonesia sebelumnya telah terbukti meningkatkan serapan tenaga kerja. Sebagai contoh, studi LPEM FEB UI menemukan bahwa terdapat peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor UMKM di kawasan perlombaan Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dampak ekonomi dan ketenagakerjaan akan redup jika kondisi COVID-19 kembali kurang kondusif.

Forum G20 juga diharapkan senantiasa menjadi ajang mempromosikan agenda tuan rumah, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia mengukung agenda bertajuk "**Improving the Employment Condition to Recover Together**". Melalui agenda tersebut, pemerintah Indonesia akan mengusulkan empat fokus utama, salah satunya "**Pasar tenaga kerja inklusif dan kuota kerja bagi penyandang disabilitas**".

Dalam tulisannya, Hanri juga menyebutkan bahwa kelompok disabilitas mengalami penurunan pendapatan lebih tinggi di masa pandemi. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya hal ini adalah partisipasi kerja pekerja penyandang disabilitas yang mayoritas berada di sektor informal. Hanya sekitar 30% pekerja dengan disabilitas yang bekerja di sektor formal. Oleh karena itu, presiden-si G20 ini diharapkan bisa menjadi momentum yang baik dan menelurkan komitmen kerja sama bilateral dengan negara anggota untuk bisa meningkatkan modal kesejahteraan bagi kelompok penyandang disabilitas, tentunya bersama dengan fokus di bidang ketenagakerjaan lainnya.



Selengkapnya:
<https://bit.ly/TajukOpini210930>

Peran Strategis Indonesia sebagai Tuan Rumah G20 2022



Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Riefky, S.E., M.Sc. dan Faradina Alifia Maizar, S.E., M.Sc., telah merilis opini editorial yang berjudul "**Peran Strategis Indonesia sebagai Tuan Rumah G20 2022**" di Harian Kontan pada 14 September 2021.

Dalam tulisannya, mereka memberikan opini terkait peran yang dapat dilakukan oleh Indonesia selaku tuan rumah Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022. Pemerintah Indonesia sendiri mengusung tema besar "Recover Together, Recover Stronger". Tema ini diambil dengan mempertimbangkan krisis kesehatan saat ini yang membutuhkan usaha kerja sama dan koordinasi di tingkat internasional yang lebih mendesak dari sebelumnya.

Tema ini sendiri relevan dibahas karena proses pemulihan yang terjadi setelah pandemi perlu menyelesaikan beberapa kondisi sosioekonomi yang telah terdampak parah akibat adanya pandemi COVID-19. Mereka mengu-

tarakan beberapa kondisi seperti membesarnya ketimpangan, dimana negara maju memiliki ruang fiskal yang jauh lebih leluasa ketimbang negara berkembang. Sehingga mendorong kelompok negara maju mampu mengeluarkan stimulus dalam jumlah yang jauh lebih besar dan mendorong pemulihan yang lebih cepat. "Implikasi dari kondisi ini tidak lain adalah proses pemulihan ekonomi yang timpang di tingkat global.", menurut Riefky.

Pada aspek lingkungan, dorongan kapasitas fiskal yang cukup serta tersedianya teknologi yang mumpuni mampu menciptakan infrastruktur yang lebih tahan bencana dan tahan perubahan iklim di negara maju ketimbang di negara berkembang. "Sayangnya, hingga saat ini, beberapa isu yang dihadapi banyak negara berkembang di seluruh dunia masih belum cukup dibahas dalam forum G20 yang diadakan di Italia pada tahun 2021 ini." tambah Faradina.

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan G20 tahun depan, selain berada dalam posisi yang strategis untuk mendorong pembahasan isu-isu mendesak yang dihadapi oleh negara berkembang pada forum internasional, Indonesia juga memegang peranan yang unik dan vital dalam membentuk dan mengarahkan diskusi pemimpin global ke arah yang lebih relevan, berkelanjutan, dan inklusif.

Selengkapnya:

<https://bit.ly/TajukOpini210914>

Seri Analisis ekonomi: Trade and Industry Brief, September 2021



Dalam satu dekade terakhir, industri video gim menjadi salah satu sub-sektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat secara global maupun nasional dan tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Perkembangan pesat yang terjadi dalam industri video gim merupakan bukti bahwa industri ini sudah sepatutnya mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah. Minat masyarakat dunia terhadap produk video gim sebagai hiburan alternatif di tengah pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19,

yang telah berlangsung lebih dari setahun, semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, perkembangan ini belum terlalu banyak dinikmati oleh *developer* dan *publisher* video gim nasional.

Tim Pusat Kajian Iklim Usaha dan Rantai Nilai Global LPEM FEB UI yang dipimpin oleh **Mohamad D. Revindo, Ph.D.** pada bulan September lalu menerbitkan **Trade and Industry Brief** yang membahas peluang industri permainan dalam upaya meningkatkan kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian selama dan pasca pandemi COVID-19. Trade and Industry Brief bulan September tersebut juga melihat perkembangan neraca perdagangan Indonesia per akhir Agustus 2021 lalu, yang kembali mencatat surplus cukup besar senilai USD4,74 miliar atau setara dengan Rp67,6 triliun, yang merupakan surplus ke-16 berturut-turut dan terbesar sepanjang 2021. Informasi yang digunakan dalam brief ini diperoleh dari Berita Resmi Statistik BPS, Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia, ITC Trademap, dan berbagai sumber lainnya.

Selengkapnya:

<https://bit.ly/TradeandIndustryBriefSept2021>

Pengelolaan Anggaran di Daerah Jadi Kunci Penanganan Pandemi



Forum Kajian Pembangunan ANU Indonesia Project bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) pada Jumat, 3 September 2021 mengadakan Public Webinar yang bertajuk **“Local Budget Resilience in the Time of COVID-19: Evidence from Indonesia”**. Pada webinar ini, **Nauli Desdiani** dan **Syahda Sabrina** yang merupakan peneliti dari LPEM FEB UI memaparkan hasil penelitiannya yang bertujuan untuk melihat lebih dalam komponen anggaran pemerintah daerah di tingkat provinsi dengan membandingkan kondisi sebelum adanya pandemi COVID-19 dan sekarang. Studi ini juga memetakan indeks kapasitas fiskal dan matriks fiskal daerah dengan beberapa variabel makroekonomi seperti PDRB, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan.

Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa COVID-19 menyebabkan terganggunya perekonomian pada hampir seluruh wilayah di Indonesia. “Wilayah yang mengandalkan sektor pariwisata seperti Bali, sangat terdampak oleh peraturan pembatasan sosial. Sementara wilayah seperti Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara, yang lebih mengandalkan sumber daya alam ketimbang sektor yang mengandalkan interaksi sosial, tidak terdampak oleh

pembatasan sosial. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi mereka yang menunjukkan angka positif.”, ujar Syahda. Fenomena pandemi COVID-19 juga memaksa banyak pemerintah di hampir seluruh dunia untuk mengimplementasikan kebijakan fiskal countercyclical (re: merespon siklus perekonomian yang ada), tak terkecuali pemerintah Indonesia. Namun, pemerintah perlu memperhatikan bahwa kebijakan *countercyclical* harus diterapkan untuk jangka pendek. “Studi terdahulu membuktikan bahwa kebijakan fiskal *countercyclical* hanya bisa diterapkan pada jangka pendek. Pemerintah selanjutnya harus memikirkan bagaimana untuk mempertahankan kebijakan fiskal mereka setelah pandemi COVID-19 berakhir, dimana perekonomian kembali pulih dan bertumbuh seperti normal.” tambah Syahda.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa proporsi belanja untuk sektor kesehatan masih rendah, kurang dari 20% di semua daerah, dengan rata-rata nasional 9%. Bahkan, anggaran kesehatan ditemukan menurun, meskipun terjadi peningkatan anggaran secara keseluruhan pada hampir seluruh provinsi. “Meskipun beberapa provinsi telah meningkatkan anggarannya, sebagian besar pemerintah daerah telah mengurangi belanja dalam sektor kesehatan. Padahal, anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, yang dimana hal tersebut bisa membantu untuk mengontrol pandemi ini”, papar Nauli. Rasio anggaran kesehatan pada tahun 2020 pun ditemukan menurun sebanyak 4% dibandingkan tahun sebelumnya. “Hal ini menyebabkan kondisi dimana banyak pemerintah daerah, terutama di Indonesia bagian timur, tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengatasi pandemi.” tambah Nauli.

Selengkapnya:
<https://bit.ly/FKPLocalBudget>

Kilas Publikasi dan Kegiatan LPEM FEB UI

Seri Analisis Makro Ekonomi: Analisa Inflasi, September 2021

Inflasi pada bulan Agustus tercatat sebesar 1,59 persen secara *year-on-year*, menguat dibanding bulan sebelumnya dengan inflasi sebesar 1,52 persen. Inflasi pada periode ini didorong oleh penguatan inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga barang bergejolak, meskipun inflasi inti mengalami sedikit pelemahan.

Selengkapnya:
<https://www.lpem.org/seri-analisis-makroekonomi-inflasi-bulanan-september-2021/>

Economic Brief

Seri Analisis Makro Ekonomi: BI Board of Governors Meeting, September 2021

Tren penurunan kasus harian Covid-19 telah membawa beberapa sinyal positif ke indikator makroekonomi dan keuangan. Hal ini ditandai dengan sedikit perbaikan pada Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI). Di sisi eksternal, dukungan IMF juga meredakan ketidakstabilan dalam waktu dekat.

Selengkapnya:
<https://www.lpem.org/macroeconomic-analysis-series-bi-board-of-governor-meeting-september-2021/>

**Seri Analisis Ekonomi:
Trade and Industry Brief, September 2021**

Salah satu sub-sektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat secara global maupun nasional dalam dekade terakhir dan tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi COVID-19 adalah industri video gim. Minat masyarakat dunia terhadap produk video gim sebagai hiburan alternatif di tengah pembatasan sosial akibat pandemi yang telah berlangsung lebih dari setahun semakin meningkat.

Selengkapnya:
<https://www.lpem.org/seri-analisis-ekonomi-trade-and-industry-brief-september-2021/>

**Labor Market Brief,
September 2021**

Di tahun 2022 mendatang, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah dan Presidensi G20 yang merupakan forum negara-negara yang merupakan representasi ekonomi besar di dunia. Salah satu pembahasan yang diangkat dalam salah satu *working group* dalam G20 mendatang adalah isu mengenai kesempatan kerja bagi kelompok penyandang disabilitas.

Selengkapnya:
<https://www.lpem.org/labor-market-brief-edisi-15-%e2%80%93-september-2021/>

**Policy Brief, September 2021
Akselerasi Jaringan
Transportasi Publik
Modern sebagai Upaya
Peningkatan Produktivitas
dan Perekonomian
Masyarakat Kota: Studi
Kasus MRT Jakarta**

DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Jabodetabek dengan tingkat mobilitas yang tinggi baik dari daerah di sekitarnya maupun di dalam Kota Jakarta itu sendiri. Tingginya tingkat mobilitas masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan timbulnya berbagai tantangan, salah satunya adalah tingginya ketergantungan pada transportasi pribadi.

Selengkapnya:
<https://www.lpem.org/akselerasi-jaringan-transportasi-publik-modern-sebagai-upaya-peningkatan-produktivitas-dan-perekonomian-masyarakat-kota-studi-kasus-mrt-jakarta/>

Indonesia berada di tengah tantangan pembangunan jangka panjangnya untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah. Seringkali negara berkembang menghadapi tantangan yang sama, salah satu strategi umum yang harus diterapkan oleh Pemerintah Indonesia adalah mengembangkan rencana infrastruktur besar-besaran di seluruh negeri.

Selengkapnya:
<https://www.lpem.org/resilient-infrastructure-in-indonesia-a-way-forward/>

**Working Paper:
No.64, September 2021**

**Resilient
Infrastructure in
Indonesia: A Way
Forward**

Webinar dan Press Conference



**Tax Research Sharing Session:
Lesson Learned from the Indonesian Tax Amnesty
Program, 8 September 2021, LPEM FEB UI**

Selengkapnya: <https://www.youtube.com/watch?v=IKFgzCVmnKI>



Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) LPEM FEB UI: Oktober—Desember 2021



Perencanaan dan Penganggaran
(4—8 Oktober 2021)



Ekonomi Makro
(11—13 Oktober 2021)



Ekonometrika
(25—29 Oktober 2021)



Analisis Kebijakan Publik
(8—12 November 2021)



Policy Paper
(8—12 November 2021)



Regulatory Impact Assessment
(22—24 November 2021)



Computable General Equilibrium
(6—8 Desember 2021)



Monitoring dan Evaluasi
(6—8 Desember 2021)

Info Diklat

Website: www.diklat.lpem.org
Pendaftaran: <https://linktr.ee/DiklatLPEMFEBUI>
Email: diklat@lpem-feui.org / diklatlpem2021@gmail.com
Whatsapp: <https://wa.me/6281196103130>

Acknowledgement

LPEM Newsletter merupakan inisiatif yang didukung oleh David and Lucile Packard Foundation. Sejak 1964, David and Lucile Packard Foundation telah memberikan hibah dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat seraya memungkinkan terciptanya kegiatan keilmuan dan perlindungan sistem kehidupan alam. Dukungan dari David and Lucile Packard Foundation tidak hanya dalam produksi newsletter, namun juga rangkaian riset terkait isu ekonomi lingkungan yang dilakukan oleh LPEM FEB UI.